

MAKALAH STUDI KELAYAKAN BISNIS
KONSEP DASAR STUDI KELAYAKAN BISNIS & PRINSIP SYARI'AH

Dosen Pengampu:

Dr. H. Fahrurazi S. Ag. MM



Disusun Oleh:

Elliyani santia (12315002)

Khotimah (123150)

Eka sari (12315011)

PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PONTIANAK

2026/2027

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wr.wb

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya semata, kami dapat menyelesaikan Makalah dengan judul: “KONSEP DASAR STUDI KELAYAKAN BISNIS & PRINSIP SYARI’AH” sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut- pengikutnya sampai hari penghabisan.

Atas bimbingan dan saran dari teman-teman maka disusunlah Makalah ini, semoga dengan tersusunnya Makalah ini dapat berguna bagi pembacanya Makalah ini disusun dalam memenuhi tugas dari mata kuliah entrepreneurship dan semoga segala yang tertuang dalam Makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dalam rangka membangun khasanah keilmuan.

Untuk itu kami berharap akan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada para pembaca guna perbaikan langkah-langkah selanjutnya, akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata.

Pontianak,30 Maret 2026

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
A. Pengertian dan tujuan SKB	3
B. Aspek-aspek utama SKB	5
C. Tahapan SKB	14
D. Perbedaan SKB konvensional dan SKB syariah dalam pendekatan dan nilai	15
E. Prinsip dasar ekonomi islam dalam bisnis	16
F. Maqasid syari'ah sebagai kerangka menilai bisnis yang baik dan berkah	17
G. Etika bisnis	17
H. Isu	18
BAB III	20
PENUTUP	20
A. Kesimpulan	20
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dunia bisnis selalu bergerak dinamis, dipenuhi peluang sekaligus risiko yang tidak bisa diabaikan. Setiap tahun, ribuan usaha baru lahir di Indonesia, namun tidak sedikit yang gulung tikar hanya dalam beberapa tahun pertama operasionalnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), sekitar 60 persen usaha kecil dan menengah mengalami kegagalan dalam tiga tahun pertama karena lemahnya perencanaan awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat berwirausaha saja tidak cukup diperlukan kajian yang sistematis dan terukur sebelum sebuah bisnis diputuskan untuk dijalankan.

Di sinilah Studi Kelayakan Bisnis (SKB) mengambil peran yang sangat penting. SKB bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah proses analisis menyeluruh yang mencakup aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, keuangan, hingga dampak sosial dan lingkungan. Dengan SKB yang dilakukan secara cermat, seorang pengusaha atau investor dapat meminimalkan risiko kerugian, memaksimalkan potensi keuntungan, dan membuat keputusan investasi yang lebih rasional dan bertanggung jawab (Ibrahim, 2021).

Namun, bagi pelaku usaha Muslim, SKB tidak bisa hanya berhenti pada kalkulasi untung-rugi semata. Ada dimensi lain yang jauh lebih dalam dan mendasar, yaitu dimensi syariah. Dalam pandangan Islam, bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan finansial, melainkan juga tentang menjalankan amanah, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir menjadi batas-batas etis yang tidak boleh dilanggar dalam praktik bisnis Islam (Antonio, 2020).

Maka dari itu, munculnya konsep SKB Syariah menjadi sebuah keniscayaan. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek teknis-ekonomi dengan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Kerangka Maqasid Syariah—yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menjadi panduan utama dalam menilai apakah sebuah bisnis layak tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi moral dan spiritual. Makalah ini hadir untuk membahas konsep tersebut secara analitis dan komprehensif.

b. Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian dan tujuan SKB?
2. Apa saja Aspek-aspek utama SKB?

3. Apa Tahapan SKB?
4. Apa Perbedaan SKB konvensional dan SKB syariah dalam pendekatan dan nilai?
5. Apa saja Prinsip dasar ekonomi islam dalam bisnis?
6. Apa itu Maqasid syari'ah sebagai kerangka menilai bisnis yang baik dan berkah?
7. Apa itu Etika bisnis?

c. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Pengertian dan tujuan SKB
2. Untuk mengetahui Aspek-aspek utama SKB
3. Untuk mengetahui Tahapan SKB
4. Untuk mengetahui Perbedaan SKB konvensional dan SKB syariah dalam pendekatan dan nilai
5. Untuk mengetahui Prinsip dasar ekonomi islam dalam bisnis
6. Untuk mengetahui Maqasid syari'ah sebagai kerangka menilai bisnis yang baik dan berkah
7. Untuk menmgetahui Etika bisnis

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Dan Tujuan SKB

Studi Kelayakan Bisnis (SKB) dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu rencana bisnis layak untuk dilaksanakan ditinjau dari berbagai aspek secara terintegrasi. Umar (2020) mendefinisikan SKB sebagai penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek dilakukan dengan berhasil. Sementara itu, Hasan et al. (2022) dalam bukunya Studi Kelayakan Bisnis menegaskan bahwa kelayakan bisnis mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pengertian ini menekankan bahwa SKB bukan hanya soal apakah bisnis bisa berjalan, tetapi apakah bisnis tersebut memiliki prospek yang baik dan layak untuk diinvestasikan sumber daya padanya.

Tujuan utama SKB sesungguhnya melampaui sekadar menghindari kerugian. Pertama, SKB berfungsi sebagai alat perencanaan (planning tool) yang membantu pengusaha merumuskan strategi bisnis yang lebih terarah. Kedua, SKB menjadi media komunikasi dengan pihak luar—seperti investor, bank, atau mitra bisnis—untuk meyakinkan mereka bahwa usaha yang akan dijalankan memiliki fondasi yang kuat. Ketiga, SKB berfungsi sebagai alat pengawasan karena data dan proyeksi yang dihasilkan menjadi tolok ukur kinerja bisnis setelah berjalan (Subagyo, 2019). Rivaldo et al. (2025) dalam jurnal *Intelek Insan Cendikia* menambahkan bahwa dalam konteks bisnis syariah, SKB juga berperan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mencakup kejujuran, keadilan, dan keberkahan usaha.

Menurut Hasan et al.(2022) dalam buku Studi Kelayakan Bisnis bahwa Studi kelayakan usaha, seperti yang diketahui, adalah evaluasi yang harus dilakukan sebelum memulai bisnis atau proyek. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko yang mungkin dialami oleh pelaku usaha. Studi kelayakan juga dikenal sebagai persiapan. sebelum pengakuan pelaksanaan atau kejadian. Studi kelayakan sebagai informasi pasti memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan oleh klien. Tidak perlu menunggu, beberapa tujuan studi kelayakan yang diidentifikasi oleh Kamsir dan Jakfar (2007):

a. Menghindari Resiko Kerugian

Pengusaha harus mengetahuinya, karena studi kelayakan adalah konsep yang mengatur dan menyelidiki pemikiran bisnis sejak awal. Ini menunjukkan kecenderungan bahwa

studi kelayakan dilakukan sebelum pemahaman bisnis dilakukan. Setiap bisnis, apapun jenisnya, pasti akan menguntungkan jika dilakukan dengan benar. Para pemula bisnis selalu mempertimbangkan tujuan utama dari studi kelayakan.

b. Mempermudah Perencanaan

Seperti yang telah di katakan sebelumnya, studi kelayakan berakhir untuk menentukan apakah pemikiran bisnis yang dimulai layak dilaksanakan atau sebaiknya ditunda. Sebenarnya, perjalanan ini akan memberi pebisnis banyak opsi untuk memikirkan bisnis seperti apa yang benar-benar layak dan produktif untuk dijalankan. Banyak keputusan ini membawa manfaat tambahan, terutama dengan memungkinkan pebisnis untuk membuat rencana konfigurasi bisnis yang sesuai dengan pasar dan sudut pandang bisnis lainnya. Akibatnya, bisnis akan berjalan seperti yang diharapkan mulai sekarang.

c. Mempermudah Pelaksanaan Pekerjaan

Tujuan sebelumnya yang baru saja diperiksa masih berhubungan dengan tujuan berikut ini. Apa? Karena pengusaha telah bekerja sama dalam menyusun, pengusaha juga akan bekerja sama dalam menerapkan presentasi yang perlu dibuat untuk mencapai tujuan. Sebagai seorang pebisnis, jangan pergi begitu saja dan membiarkan staf menangani masalah pameran mereka. Itu benar-benar jauh dari dasar. Untuk hampir semua aliran, pengusaha harus waspada dan waspada.

d. Mempermudah Pengawasan

Anda akan diajak bekerja sama tentang manajemen setelah semuanya sudah diatur. Mengapa mengamati penting? Tanggapannya hanya mengatakan bahwa semua desain ide yang telah dibuat sejak awal harus disimpan dan tidak akan berubah. Apakah itu penting? Tetap saja, karena itulah tempat terbaik untuk menilai hasil pekerjaan pengusaha. Posisi penataan sangat penting, oleh karena itu harus selalu diperhatikan.

e. Mempermudah Pengendalian

Tujuan terakhir adalah menyelesaikan studi kelayakan bisnis dengan cara yang menyenangkan. Tujuan ini akan membantu Anda mengatasi gangguan di lapangan. Pengendalian ini dilakukan untuk menjamin kembalinya pameran seperti biasa. Karena akan berdampak langsung pada bisnis Anda, kontrol ini sangat penting. Pebisnis terkejut tidak akan menentang ketika perusahaan dipaksa runtuh.

Dari perspektif yang lebih kritis, SKB sebenarnya adalah upaya untuk mengurangi asimetri informasi antara pelaku bisnis dengan para pemangku kepentingan. Tanpa SKB, keputusan investasi sering kali hanya didasarkan pada intuisi atau antusiasme sesaat—sesuatu yang sangat berisiko di tengah dinamika pasar yang kompleks seperti saat ini.

Ahmadi et al. (2025) menegaskan bahwa aspek pasar merupakan pilar utama dalam SKB, karena pemahaman mendalam tentang dinamika permintaan, segmentasi, dan perilaku konsumen memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi pelaku usaha.

B. Aspek-aspek Utama SKB

SKB yang komprehensif mencakup enam aspek utama yang saling terkait dan tidak bisa dikaji secara terpisah:

a. Aspek Pasar dan Pemasaran

Menganalisis permintaan pasar, segmentasi, persaingan, serta strategi marketing mix (produk, harga, tempat, promosi). Aspek ini menjawab pertanyaan mendasar: "Apakah ada pasar yang cukup besar untuk produk atau jasa yang ditawarkan?"

b. Aspek Teknis dan Operasional

Mengkaji lokasi usaha, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan, dan proses operasional. Kesalahan dalam aspek teknis sering kali menjadi penyebab kegagalan operasional meski pasar sudah tersedia.

c. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Menilai struktur organisasi, kompetensi tim manajemen, dan kebutuhan SDM. Bisnis yang hebat sekalipun dapat gagal di tangan manajemen yang lemah.

d. Aspek Hukum dan Legalitas

Memastikan bahwa bisnis beroperasi dalam koridor hukum yang berlaku dari izin usaha, bentuk badan hukum, hingga kepatuhan terhadap regulasi sektoral.

e. Aspek Keuangan

Meliputi proyeksi arus kas, analisis titik impas (BEP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. Aspek ini sering dianggap paling krusial karena berkaitan langsung dengan keputusan investasi.

f. Aspek Sosial dan Lingkungan (AMDAL)

Menilai dampak bisnis terhadap lingkungan fisik dan sosial. Saat ini, aspek ini semakin mendapat perhatian besar seiring meningkatnya kesadaran tentang keberlanjutan (sustainability).

Aspek studi kelayakan dapat disesuaikan oleh delapan organisasi, sehingga organisasi dapat menambahkan bagian mereka sendiri. Pilihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Di mana persyaratan antara organisasi dapat berbeda. Tidak selalu identik. Berikut ini adalah beberapa komponen dasar umum bisnis studi kelayakan Hasan et al.(2022) dalam buku Studi Kelayakan Bisnis:

Ini adalah elemen yang secara langsung terkait dengan keabsahan barang dagangan perusahaan. Akta pendirian, NPWP, dan surat pengurusan perusahaan adalah beberapa modelnya. Di mana semuanya terhubung ke elemen yang sah dari aspek bisnis. Demikian pula, dalam studi kelayakan bisnis, legalitas terkait dengan keabsahan dan strategi pemasaran masa depan perusahaan.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah regulasi elemen yang terlibat dalam bisnis studi kelayakan. Meskipun banyak orang yang memulainya dari sudut pandang lain. Di mana Hal ini bergantung pada kemampuan masing-masing organisasi untuk melakukannya.

Untuk memeriksa keabsahan, keabsahan, dan ketidaksempurnaan laporan yang ada atau yang dimiliki, ilmuwan bisnis harus memeriksa legitimasi catatan, serta kredibilitas dan puncak laporan. Di antaranya adalah:

- a. Lisensi dipegang
- b. Substansi Hukum
- c. Deklarasi tanah
- d. Catatan pendukung lainnya yang terkait dengan latihan. substansi bisnis

Apa saja yang dibahas di dalam aspek hukum, Antara lain adalah:

- a. Rencana anggaran dasar perusahaan.
- b. Departemen/Lembaga/Instansi terkait dengan pihak perusahaan
- e. Legalitas
- f. Bentuk badan hukum perusahaan

Dalam studi kelayakan bisnis, elemen hukum harus diprioritaskan. Mungkin seorang pengusaha sedang berpikir tentang alasan hukum harus segera berkonsentrasi pada pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Itu logis, terutama karena seandainya Pemeriksaan aspek yang sah akan menentukan apakah gagasan bisnis masih relevan untuk dibahas. Jika diketahui bahwa gagasan bisnis tidak masuk akal dari sudut pandang yang sah, maka ada alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan aspek lain.

C. Ketentuan hukum tidak sama

Setiap jenis bisnis organisasi mungkin unik dan aturan. dasar yang sah juga tidak sama. Dimana hal tersebut berpengaruh pada kerumitan bisnis yang dijalankan. Kemandirian lokal dapat membawa perubahan pada pengaturan yang sah dan lebih jauh

lagi berbagai hibah antar kabupaten. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman tentang pengaturan yang sah dan hibah usaha untuk setiap area.

Otoritas publik yang menentukan izin dan pengaturan yang sah dari spekulasi ini juga tidak unik tetapi memiliki alasan. Dimana tujuannya adalah untuk menjaga segala sesuatu di bawah kendali di mata publik semua dalam. semua. Diyakini bahwa individu yang tinggal di sekitar area organisasi bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, bukan hanya mendapatkan konsekuensi yang merugikan. Karena spekulasi bisnis akan mencakup penghuni lingkungan di area bisnis organisasi.

1. Tujuan adanya aspek hukum

Dengan hadirnya aspek yang halal, sebenarnya akan ingin melihat apakah suatu bisnis telah mengikuti hibah dan pengaturan yang sah dalam suatu ruang atau tidak. Anda dapat melihat tujuan tertentu di bawah ini:

- a. Penyelidikan atas jaminan yang dapat diberikan jika usaha tersebut dibiayai melalui kredit
- b. Pemeriksaan keabsahan usaha.
- c. Investigasi ketepatan struktur substansi yang sah, kontras dengan bisnis yang dianggap dijalankan
- d. Pemeriksaan kapasitas usaha yang diusulkan dalam. pengumpulan kebutuhan hibah.

2. Jenis badan usaha

Aktivitas bisnis tidak dapat dipisahkan berdasarkan hal yang disebut otorisasi, di samping jenis badan usaha. Dimana keduanya dibutuhkan dalam mempertahankan sebuah bisnis. Untuk jenis badan usaha yang akan dipilih, tergantung pada jumlah pemilik dan modal yang dibutuhkan. Beberapa renungan yang mendasari pemilihan. badan usaha antara lain:

- a. Prasyarat yang sah
- b. Lapangan modern
- c. Berapa banyak modal yang diharapkan untuk mempertahankan bisnis?
- d. Tingkat kewajiban dan batas moneter dan sah
- e. Bentuk badan usaha di Indonesia antara lain:

1) Perusahaan Perseroan.

Merupakan jenis elemen bisnis yang tidak mengenal pemilik antara kebebasan kepemilikan organisasi dan hak individu (Indriyo, 2005). Padahal, menurut Private (2002),

pengertian organisasi adalah suatu jenis elemen bisnis di mana seseorang dimiliki dan orang tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya organisasi.

2) Perseroan Terbatas

PT adalah perserikatan beberapa visioner bisnis rahasia menjadi satu unit. Bersama-sama berurusan dengan bisnis. Organisasi memberikan pintu terbuka ke wilayah lokal yang lebih luas jika mereka memiliki keinginan untuk mengingot modal bagi organisasi. Untuk lebih spesifik dengan membeli bagian dalam organisasi.

3) Perserikatan Komanditer

CV adalah hubungan beberapa pebisnis rahasia yang menjadi satu kesatuan. Bersama-sama berurusan dengan bisnis. Sebagian dari individu CV adalah anggota yang dinamis. Anggota yang berbeda adalah individu yang tidak aktif.

4) Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari aset terpisah, untuk mencapai fokus di bidang berat, sosial dan amal, yang tidak memiliki orang.

5) Koperasi

Berdasar pasal 1 Ayat 1 UU 25/1992, Yang bermanfaat adalah badan usaha dengan individu serta elemen sah yang bermanfaat. Koperasi mendasarkan latihan bisnis mereka pada standar yang dapat diterima. Koperasi juga merupakan penggerak ekonomi individu tetapi menggunakan aturan hubungan.

3. Peraturan dan Undang-undang

PP yang menghubungkan dengan aspek yuridis. Dimana pedoman administrasi ini diperlukan untuk setuju dengan dasar badan usaha. Beberapa di antaranya adalah:

- a. PP nomor 10/2003 mengenai Perusahaan Perseroan pada bidang Pengelolaan Aset
- b. UU nomor 19/2003 mengenai BUMN
- c. UU nomor 5/1962 mengenai perusahaan daerah
- d. PP Perdagangan RI nomor 13/M-DAG/PER/3/2006 mengenai ketentuan dan tata cara. Menerbitkan Surat Izin Usaha Penjualan secara Langsung.
- e. UU nomor 13/1995 mengenai Izin Usaha Industri
- f. UU nomor 25/1995 mengenai Koperasi
- g. PP nomor 63/2008 mengenai Yayasan
- h. UU nomor 40/2007 mengenal Perseroan Terbatas

4. Izin Usaha

Pemerintah mengeluarkan beberapa jenis surat izin usaha. Inilah beberapa izin usaha terkait perdagangan. Antara lain:

a. Surat Izin Tempat Usaha

Tiap perusahaan membutuhkan dan wajib mengurus SITU. Tujuannya untuk kelancaran dan keamanan usaha. Yang mengeluarkan SITU adalah pemerintah Kotamadya atau Kabupaten.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

SIUP untuk pengusaha firma, perseorangan, koperasi, CV, PT, dan BUMN. Kewajiban dari pemegang surat ini untuk atasan kantor wilayah Dept. Perdagangan & Industri / Kantor Dept. Perdagangan yang membuat SIUP. Jika perusahaan tak lagi melakukan aktivitas perdagangan dan menutup perusahaan, diikuti pembelian SIUP.

c. Nomor Pokok Wajib Pajak

Tiap warga negara dengan penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak wajib membayar pajak kepada negara. Harus mendaftarkan NPWP ke pelayanan Pajak setempat. Hal ini juga sudah jelas diatur dalam undang-undang. Dan memang merupakan kewajiban warga negara. Apabila melanggar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU nomor X/2000. Karena anggapannya menimbulkan kerugian untuk negara. Sebab pajak adalah pendapatan utama dari sebuah negara. & Industri/Kantor Dept. Perdagangan yang membuat SIUP. Jika perusahaan tak lagi melakukan aktivitas perdagangan dan menutup perusahaan, diikuti pembelian SIUP.

d. Nomor Register Perusahaan & Tanda Daftar Perusahaan

UU nomor 3/1982 juga mengatur mengenai wajib daftar perusahaan, di mana perusahaan wajib untuk daftar pada kantor pendaftaran perusahaan. Yakni pada Kantor Dept. Perdagangan Setempat. NRP dikenal juga dengan nama lain TDP. Di mana wajib dipasang pada tempat yang gampang dilihat. Nomor NRP atau Nomor TDP ini dicantumkan di papan nama sebuah perusahaan, beserta dokumen yang dipakai di kegiatan usaha tersebut.

e. Analisis Mengenal Dampak Lingkungan

Yang berikutnya adalah AMDAL. Suatu hasil studi menggunakan pendekatan ilmiah. Yang dipandang melalui beberapa sudut pandang dari ilmu pengetahuan. Adalah dampak penting dari kegiatan usaha yang terpadu dan direncanakan pada lingkungan hidup di dalam kesatuan hamparan ekosistem, serta melibatkan kewenangan lebih yang berasal dari instansi bertanggung jawab.

1. Aspek Ekonomi

Perencanaan sebuah bisnis yang baru dirintis maupun bisnis perluasan dari usaha yang sudah ada perlu ditelaah manfaatnya dari aspek ekonomi bagi masyarakat luas, termasuk pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat sekitar maupun perekonomian negara. Diharapkan adanya investasi dari aspek ekonomi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan bagi pemerintah akan memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Aspek Budaya

Kalau dipandang dari aspek budaya, dipikirkan apakah bisnis dalam organisasi tersebut secara nyata mempengaruhi tradisi yang ada di lingkungan sekitar tempat bisnis atau organisasi itu didirikan. Aspek budaya bersama dengan aspek ekonomi, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, serta manajemen dan keuangan digunakan sebagai dasar penelitian studi kelayakan, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan, ditunda, atau bahkan tidak dijalankan.

3. Aspek Pasar Dan Pemasaran

Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis terkait dengan ada atau tidaknya peluang pasar yang luar biasa untuk produk-produk organisasi. Analisis dan penilaian aspek pasar merupakan salah satu penilaian yang paling penting dalam rangka menilai kelayakan suatu proyek, karena banyak proyek tidak berhasil akibat mengabaikan aspek pasar (Kasmir & Jakfar, 2013).

Strategi pemasaran harus dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap kesempatan pada beberapa sasaran pasar. Adapun beberapa hal yang akan dikaji dalam aspek ini antara lain:

- a. Potensi pasar, yang akan dievaluasi dari jenis pelanggan atau pasar yang dipilih.
- b. Jumlah calon pelanggan, di mana jumlahnya diketahui karena cara yang paling umum untuk memperkirakan dan memperkirakan permintaan dan penawaran, berdasarkan hasil pesaing komparatif yang sudah ada saat ini.
- c. Daya beli masyarakat juga akan dipertimbangkan, dengan mempertimbangkan perkembangan atau peningkatan penduduk.
- d. Keadaan kontes dalam iklim modern.
- e. Target, divisi, dan posisi item pada lookout.

- f. Perilaku, cara pandang, dan pemenuhan pelanggan atas barang-barang komparatif (setara) yang ada saat ini.
- g. Yang terakhir adalah mempromosikan papan, di mana itu terdiri dari penyelidikan campuran iklan dan kontes.

4. Aspek Teknis Dan Teknologi

Aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis terkait dengan rencana kualitas barang, pilihan sistem produksi, penentuan teknologi, dan lain-lain, di mana masing-masing merupakan komponen yang berhubungan dengan teknologi yang khusus digunakan oleh suatu organisasi. Aspek teknis meneliti kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana secara teknis proses produksi akan dilaksanakan.

Evaluasi aspek teknis mempelajari kebutuhan-kebutuhan teknis bisnis, seperti penentuan kapasitas produksi, jenis teknologi yang dipakai, pemakaian peralatan dan mesin, lokasi bisnis, dan letak perusahaan yang paling menguntungkan. Oleh karena itu, aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis sangat penting untuk dikaji secara cermat dan mendalam (Umar, 2005).

5. Aspek Manajemen

Selain aspek teknis dan teknologi, terdapat pula aspek manajemen yang merupakan aspek penting dalam studi kelayakan bisnis, terkait dengan perkembangan dan peningkatan tugas organisasi. Ruang lingkup aspek manajemen sangat luas, mulai dari manajemen operasional hingga administrasi keuangan organisasi, di mana segala sesuatunya berhubungan dengan kegiatan organisasi sehingga dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Perlu disadari bahwa adanya pasar yang potensial tidak selalu berarti perusahaan bisa memanfaatkannya, karena semua tergantung pada kemampuan manajemen. Jika pelaksana tidak mampu menjalankan dengan baik, maka kegiatan tersebut mungkin tidak cost saving, dan pemborosan keuangan selalu bisa timbul meskipun dalam rencana semuanya tampak baik. Studi kelayakan bisnis mencakup aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, yang seluruhnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis (LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, 2019).

6. Aspek Keuangan

Aspek keuangan memiliki hubungan dengan seberapa banyak modal dan sumber aset yang akan diberikan oleh organisasi, serta kapan modal tersebut akan kembali. Dalam istilah keuangan hal ini dikenal sebagai ROI (Return on Investment). Aspek ekonomi dan keuangan merupakan aspek inti karena aspek ini menentukan kelayakan usaha dilihat dari segi ekonomi dan keuangan.

Tujuan penilaian aspek keuangan adalah untuk mengetahui prakiraan pendanaan dan aliran kas proyek bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya suatu rencana bisnis, meliputi penilaian sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya selama periode tertentu, serta kriteria penilaian investasi (Kasmir & Jakfar, 2013). Komponen aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis terdiri dari:

- a. Cash flow/ Aliran kas
- b. Perihal kepekaan
- c. Cost of capital / Biaya modal (Biaya utang, biaya modal sendiri)
- d. Pemilihan investasi (Pilihan beli atau leasing, urutan prioritas dari proyek bisnis).

7. Aspek SDM

Sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam studi kelayakan bisnis, dengan alasan bahwa dengan SDM yang mumpuni sebuah bisnis bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Apalagi saat ini organisasi membutuhkan SDM yang dapat bekerja sama dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang inovatif. Jadi aspek SDM adalah salah satu kunci dalam studi kelayakan bisnis.

Rencana bisnis yang akan diimplementasikan melalui pembangunan proyek bisnis secara rutin memerlukan kelayakan aspek SDM-nya, karena SDM merupakan salah satu komponen yang harus dievaluasi dengan cermat dan sistematis sebelum mengambil keputusan investasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek atau ide bisnis memiliki potensi untuk berhasil serta dapat meminimalkan risiko kegagalan jangka panjang (Husnan & Suwarsono, 2007).

Contoh Penerapan Aspek Studi Kelayakan Bisnis

Ini akan lebih jelas dengan asumsi Anda memeriksa pelatihan. Jadi itu bukan hanya hipotesis. Meskipun secara praktis berbicara secara normal, tidak semua aspek harus ada dalam proposisi yang Anda buat. Namun, ada beberapa komponen penting yang harus

menonjol dan harus dimasukkan, jangan sampai terlewatkan. Juga, inilah contoh menjalankan 7 bisnis aspek studi kelayakan:

Studi kelayakan bisnis dalam bisnis property

Setiap bisnis pasti memiliki berbagai kesulitan dan masalah. Dimana kesulitan tersebut harus diselesaikan oleh organisasi yang bersangkutan. Di property bisnis, peminat dan pasarnya cukup banyak. Jadi itu bukan masalah. Namun yang harus dibenahi adalah status hukum tanah itu tidak boleh dimiliki, dan modal dasarnya dari mana.

Jika ada rumah lain yang dijual setelah 2 tahun pembangunan. Manfaat dalam hal apapun bisa diperoleh atau tidak. Dari sini Anda dapat mengetahui cara mensurvei aspek di kelayakan a bisnis. Setiap area bisnis juga memiliki cara yang berbeda, dalam hal cara memeriksa kelayakan. bisnis.

Dimana semakin banyak pengalaman bisnis yang Anda dapatkan di lapangan. Maka akan lebih mudah bagi Anda untuk mengantisipasi pemikiran bisnis mana yang layak untuk Anda jalankan, dan mana yang tidak.

Siapa saja yang memerlukan studi kelayakan bisnis

Pihak yang akan membutuhkan studi kelayakan bisnis adalah:

a. Investor

Pendukung keuangan atau aset dalam bisnis akan fokus pada kemungkinan bisnis yang kontras dengan tingkat keuntungan.

b. Pemerintah

Jelas otoritas publik adalah pihak yang tidak akan pernah terisolasi dari persyaratan untuk studi kelayakan bisnis. Karena otoritas publik akan fokus pada apakah suatu organisasi akan memberikan keuntungan bagi ekonomi publik, serta pendapatan pemerintah, dari biaya yang harus dibayar oleh bisnis atau perusahaan.

c. Kreditor

Pihak luar yang juga akan membutuhkan usaha dari suatu usaha adalah pemberi pinjaman. Karena penyewa akan melihat studi kelayakan dan fokus pada. elemen keamanan aset, yang nantinya akan dipinjamkan. ke perusahaan untuk tindakan bisnis.

d. Tahapan Studi Kelayakan Bisnis

Dalam studi kelayakan bisnis terdiri dari beberapa fase. Diantara yang lain:

1. Penemuan ide

Agar usaha yang diperkirakan akan dibuat, dapat mengantarkan suatu barang yang menjual tersedia untuk dibeli atau produktif, maka diperlukan penelitian. Juga,

eksplorasi seperti itu harus dilakukan dengan pengaturan yang bagus dan dengan bantuan yang memadai sumber daya. Jika terdapat lebih dari satu pemikiran usaha, maka akan dipilih dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Keyakinan dalam kapasitas tugas untuk menciptakan manfaat
- b) Apakah usaha itu dipikirkan.
- c) Pengambilan keputusan dapat melibatkan dirinya dalam masalah-masalah yang bersifat khusus

2. Penelitian

Tahapan kedua adalah penelitian. Setelah pemikiran usaha dipilih secara efektif. Kemudian, dilanjutkan eksplorasi dari atas ke bawah. Ujian dipimpin menggunakan strategi logis di bawah ini:

- a. Mencari data
- b. Penanganan data
- c. Analisis dan terjemahan efek samping dari penanganan informasi
- d. Menyimpulkan hasilnya
- e. Laporan hasil akhir

3. Evaluasi

Tidak berhenti pada tahap eksplorasi, tahap selanjutnya adalah tahap penilaian. Jadi pada tahap ini satu hal akan dikontraskan dan hal lain, menggunakan. ukuran pada premis subjektif atau kuantitatif. Untuk penilaian diri dipisahkan menjadi 3, antara lain:

- a. Evaluasi bisnis ventura yang akan ditata
- b. Evaluasi usaha yang akan dibuat
- c. Evaluasi bisnis yang telah dioperasionalkan secara rutin

Dalam penilaian bisnis yang akan dilihat, khususnya pengeluaran umum yang dilakukan dari bisnis yang diusulkan, dan keuntungan yang akan diperoleh. (Perkiraan)

4. Pengurutan rekomendasi yang layak

Jika pasti ada tawaran untuk lebih dari satu paket bisnis yang dianggap bagus. Kemudian, pada saat itu, harus dibuat perlombaan politik yang memiliki skor paling tinggi jika dibandingkan dengan rekomendasi yang berbeda berdasarkan standar evaluasi yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Pelaksanaan

Jika Anda telah memilih paket bisnis. Anda benar-benar ingin membuat pengaturan kerja untuk pelaksanaan perbaikan. Mulai dari menentukan jenis pekerjaan, kemampuan dan jumlah penyelenggara, ketersediaan cadangan tanpa batas, dan persiapan manajemen juga tidak boleh diabaikan.

e. Pelaksanaan

Mengenai pengakuan peningkatan proyek, diperlukan upaya manajemen. Setelah pengerjaan selesai, tahap selanjutnya adalah eksekusi normal dari tugas-tugas bisnis. Untuk bekerja dengan sukses dan mahir untuk meningkatkan manfaat, perusahaan. dalam tugas, harus ada kajian yang menilai bisnis mulai Di dari showcasing, uang, aktivitas dan kapasitas produksi.

f. Mempelajari pasar dengan lebih mendalam

Setelah Anda memastikan bahwa pemikiran Anda memiliki potensi yang memadai untuk dieksekusi. Jadi apa tahap berikut yang harus Anda ambil? Tanggapannya adalah untuk berkonsentrasi secara mendalam tentang situasi ekonomi di mana item bisnis Anda akan dipromosikan.

Lihat kondisinya masih belum berubah seperti saat Anda melakukan pra-pemeriksaan atau telah mengalami perubahan. Dengan asumsi itu telah berubah, Anda harus tahu apakah bisnis yang dijalankan dapat menyesuaikan. Dengan asumsi Anda bingung, silakan lihat modelnya.

Jika Anda seorang pedagang selai nanas, Anda pasti ingin datang ke beberapa pedagang yang juga menjual selai nanas. Coba tanyakan di mana mereka mendapatkan stok selai mereka. Anda juga dapat mengetahui apakah penawaran selai nanas mempengaruhi bisnis mereka secara umum atau tidak. Mungkin Anda juga bisa bertanya kepada peternak nanas yang menjual nanas yang ditangani.

C. Tahapan SKB

SKB bukan proses yang linear, melainkan iteratif. Secara umum, pelaksanaannya melalui tahapan berikut:

- a. Identifikasi Peluang Bisnis dengan cara menganalisis kebutuhan pasar yang belum terpenuhi secara optimal.
- b. Studi Pendahuluan yaitu pengumpulan data awal dan evaluasi awal kelayakan secara kasar.
- c. Pengembangan Rencana Bisnis dengan merancang model bisnis secara detail.
- d. Analisis Mendalam per Aspek ini adalah inti dari SKB yang melibatkan riset lapangan, proyeksi finansial, dan penilaian risiko.

- e. Kompilasi dan Evaluasi yaitu menyatukan seluruh temuan dan membuat penilaian integrative
- f. Keputusan Investasi go atau no go berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh (Ibrahim, 2021).

Yang sering luput dari perhatian adalah bahwa keputusan no-go pun merupakan hasil yang berharga. Menghentikan sebuah rencana bisnis yang tidak layak sebelum dieksekusi jauh lebih menguntungkan daripada memaksakan bisnis yang sejak awal memiliki cacat fundamental.

D. Perbedaan SKB Konvensional Dan SKB Syariah Dalam Pendekatan Dan Nilai

Perbedaan antara SKB konvensional dan SKB syariah bukan hanya soal penambahan klausul halal-haram semata. Perbedaannya bersifat fundamental dan menyentuh akar filosofi bisnis itu sendiri. Saputra dan Rohman (2024) dalam penelitian mereka terhadap UMKM Dodolanku Surabaya menunjukkan bahwa SKB syariah tidak sekadar menambahkan filter kehalalan produk, tetapi juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pemasaran, penetapan harga, hingga distribusi. Adapun hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Intelek Insan Cendikia (2025) mempertegas bahwa SKB syariah dan konvensional berbeda secara mendasar dalam kerangka nilai: syariah menggabungkan aspek finansial (NPV, profitabilitas) dengan prinsip Islam, sementara konvensional hanya berfokus pada keuntungan dan risiko ekonomi semata. Tabel berikut menyajikan perbandingan komprehensif antara keduanya:

Tabel 1. Perbandingan SKB Konvensional dan SKB Syariah

ASPEK	SKB KONVENSIONAL	SKB SYARI'AH
Landasan Nilai	Profit maksimal & efisiensi ekonomi	Maslahah (kebaikan bersama) & ridha Allah
Sumber Modal	Bebas, termasuk kredit berbunga (riba)	Dilarang riba; menggunakan bagi hasil (mudharabah, musyarakah)

Penilaian Resiko	Berbasis probabilitas finansial	Menghindari gharar (ketidakpastian berlebih) dan maysir (spekulasi)
Jenis Usaha	Semua sektor legal secara hukum positif	Wajib halal; tidak boleh haram (alkohol, judi, dsb.)
Etika Bisnis	CSR bersifat sukarela/regulasi	Amanah, jujur, adil sebagai kewajiban moral-religius
Orientasi Akhir	Return on Investment (ROI)	Falah: keselamatan dunia dan akhirat

Sumber: Diadaptasi dari Antonio (2020) dan Karim (2021)

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa SKB syariah tidak hanya menambahkan filter halal-haram, tetapi membangun keseluruhan kerangka evaluasi di atas fondasi yang berbeda. Jika SKB konvensional bertanya "Apakah ini menguntungkan?", SKB syariah bertanya "Apakah ini menguntungkan, halal, dan membawa masalah?"—sebuah pertanyaan yang jauh lebih komprehensif.

E. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis

1. Larangan Riba

Riba secara harfiah berarti tambahan atau kelebihan. Dalam konteks ekonomi Islam, riba merujuk pada setiap tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli tanpa disertai 'iwadh (padanan yang sah). Al-Qur'an secara tegas melarang riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275-279. Implikasi praktisnya dalam SKB adalah bahwa struktur permodalan tidak boleh melibatkan kredit berbunga konvensional. Sebagai alternatif, akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) menjadi instrumen yang direkomendasikan (Antonio, 2020). Dalam analisis studi kelayakan bisnis syariah pada sektor IKM yang dilakukan oleh Agustin (2017), ditunjukkan bahwa penggunaan akad pembiayaan syariah secara konsisten justru meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat fondasi keuangan bisnis dalam jangka panjang.

2. Larangan Gharar

Gharar berarti ketidakpastian yang berlebihan atau penipuan dalam transaksi. Dalam SKB, larangan gharar menuntut transparansi penuh dalam proyeksi bisnis—tidak boleh ada

informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi untuk menyesatkan investor atau mitra bisnis. Praktik seperti rekayasa laporan keuangan atau penyelewengan data pasar jelas melanggar prinsip ini. Larangan gharar juga berimplikasi pada perlunya riset pasar yang jujur dan proyeksi keuangan yang realistis, bukan sekadar angka yang dibuat untuk terlihat menarik (Karim, 2021).

3. Larangan Masyir

Maysir atau perjudian dilarang karena mengandung unsur spekulasi yang merusak dan mengakibatkan transfer kekayaan tanpa ada nilai tambah produktif. Dalam konteks bisnis modern, larangan maysir relevan dengan penghindaran investasi di instrumen derivatif yang bersifat sangat spekulatif. SKB syariah harus memastikan bahwa sumber pendapatan bisnis berasal dari kegiatan produktif yang riil, bukan dari spekulasi finansial semata.

F. Maqashid Syari'ah Sebagai Kerangka Menilai Bisnis Yang Baik Dan Berkah

Maqasid Syariah tujuan-tujuan syariah adalah kerangka komprehensif yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh, terutama Al-Ghazali dan Al-Syatibi, untuk memahami hikmah di balik hukum Islam. Lima elemen pokoknya adalah penjagaan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Dalam konteks SKB, Maqasid Syariah berfungsi sebagai filter nilai. Sebuah bisnis tidak hanya dinilai dari apakah ia menghasilkan keuntungan (hifzh al-mal), tetapi juga apakah ia melindungi jiwa misalnya tidak memproduksi barang berbahaya apakah ia menjaga akal tidak memproduksi minuman keras atau narkoba apakah ia menjaga keturunan tidak bergerak di industri yang merusak keluarga dan apakah ia menjaga nilai-nilai agama. Pendekatan ini menjadikan SKB syariah jauh lebih holistik dibandingkan SKB konvensional (Majid, 2022).

Contoh aplikatif: sebuah bisnis minuman beralkohol mungkin sangat menguntungkan secara finansial, tetapi akan gagal dalam uji Maqasid Syariah karena merusak akal dan bertentangan dengan nilai agama. Di sinilah letak kekuatan paradigma SKB syariah ia menolak dikotomi antara keberhasilan ekonomi dan kebaikan moral.

G. Etika Bisnis

Etika bisnis Islam bukan sekadar daftar larangan, melainkan sebuah sistem nilai positif yang membentuk karakter pelaku bisnis Muslim. Penelitian Jannah et al. (2023) dalam Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi menemukan bahwa ketidaksesuaian penerapan etika bisnis Islam seperti praktik menyembunyikan cacat

produk atau penetapan harga yang tidak adil menjadi salah satu faktor utama hilangnya kepercayaan konsumen dan keruntuhan bisnis dalam jangka panjang. Sementara itu, Setiawan et al. (2025) menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis di industri perbankan syariah memberikan peluang besar berupa loyalitas nasabah yang jauh melebihi ekspektasi finansial semata. Empat nilai inti yang menjadi fondasi etika bisnis Islam adalah:

a. Shidq (Kejujuran)

Rasulullah Saw. adalah pedagang yang jujur sebelum menjadi nabi, dan kejujuran dalam bisnis dijamin dengan keutamaan surga. Dalam SKB, kejujuran berarti menyajikan data dan proyeksi yang akurat, tidak melebih-lebihkan potensi keuntungan, dan tidak menyembunyikan risiko.

b. Amanah (Dapat Dipercaya)

Pelaku bisnis Muslim adalah pemegang Amanah baik amanah dari investor, karyawan, pelanggan, maupun masyarakat luas. Kepercayaan adalah aset yang lebih berharga dari modal finansial.

c. Adl (Keadilan)

Islam sangat menekankan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam konteks bisnis, ini berarti pembagian keuntungan yang adil, upah yang layak bagi karyawan, dan harga yang tidak eksploitatif bagi konsumen.

d. Maslahah (Memberi Manfaat)

Bisnis yang baik adalah bisnis yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mengekstraksi nilai dari pasar.

H. Studi Kasus/Isu

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah salah satu contoh paling relevan dari penerapan SKB Syariah dalam konteks Indonesia. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, melayani segmen masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh perbankan formal. Dalam konteks yang lebih luas, Widayanti et al. (2025) menunjukkan bahwa manajemen lembaga keuangan syariah seperti BMT yang dijalankan secara profesional berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat nasional.

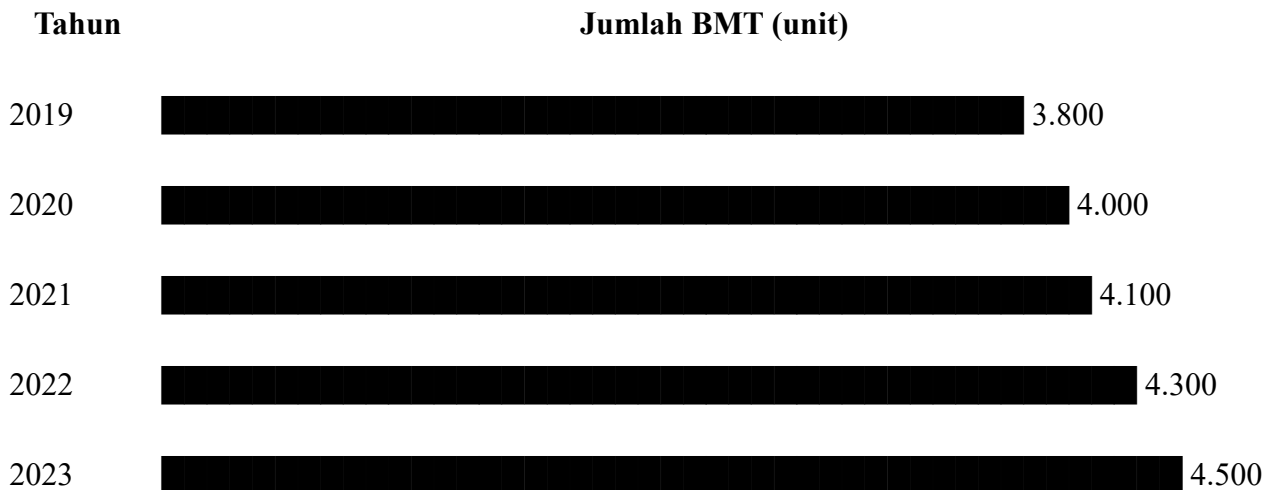
Sebelum mendirikan sebuah BMT baru, para penggagas harus melewati proses SKB yang mempertimbangkan:

- a. Aspek pasar yaitu berapa banyak usaha kecil di wilayah tersebut yang belum memiliki akses ke modal syariah

- b. Aspek keuangan yaitu apakah dengan akad mudharabah dan musyarakah, BMT tersebut dapat mencapai titik impas dalam jangka waktu tertentu
- c. Aspek syariah yaitu apakah seluruh produk yang ditawarkan telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah, dan
- d. Aspek sosial yaitu seberapa besar dampak positif yang akan diberikan kepada komunitas sekitar (Majid, 2022).

Data menunjukkan bahwa per tahun 2023, terdapat lebih dari 4.500 BMT yang aktif di Indonesia dengan total aset mencapai lebih dari Rp 16 triliun (OJK, 2023). Pertumbuhan ini membuktikan bahwa pendekatan SKB syariah yang memadukan kalkulasi finansial dengan nilai-nilai Islam bukan hanya idealistis, tetapi juga praktis dan menghasilkan dampak nyata.

Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah BMT di Indonesia (2019-2023)



Sumber: OJK (2023), diolah penulis

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang saling melengkapi. Pertama, Studi Kelayakan Bisnis merupakan instrumen yang tidak tergantikan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Ia bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan sebuah proses analitis yang secara signifikan meningkatkan probabilitas keberhasilan bisnis dengan meminimalkan risiko dan memaksimalkan perencanaan.

Kedua, SKB Syariah hadir bukan sebagai versi yang "lebih ketat" dari SKB konvensional, melainkan sebagai paradigma yang berbeda secara fundamental. Jika SKB konvensional bertumpu pada logika efisiensi ekonomi semata, SKB syariah mengintegrasikan logika masalah kebaikan menyeluruh bagi semua pemangku kepentingan, dunia dan akhirat. Perbedaan ini bukan hambatan, melainkan keunggulan kompetitif tersendiri di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya bisnis yang etis dan berkelanjutan.

Ketiga, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir bukanlah batasan yang mempersulit, melainkan pagar pelindung yang menjaga bisnis dari risiko sistemik yang sering kali diabaikan dalam pendekatan konvensional. Sementara itu, Maqasid Syariah memberikan kerangka evaluasi yang holistik, dan etika bisnis Islam menanamkan karakter yang menjadi pondasi kepercayaan jangka panjang

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran yang relevan dan aplikatif. Pertama, bagi para calon wirausahawan Muslim, SKB syariah sebaiknya dijadikan tahap wajib sebelum memulai usaha apapun. Investasi waktu dan pikiran dalam SKB jauh lebih hemat dibandingkan menanggung kerugian akibat usaha yang tidak terencana.

Kedua, bagi perguruan tinggi Islam, kurikulum SKB syariah perlu diperkuat dengan pendekatan praktis—bukan hanya teoritis. Simulasi bisnis, kunjungan ke lembaga

keuangan syariah, dan pengerjaan SKB untuk kasus nyata akan sangat meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Ketiga, bagi pemerintah dan regulator, perlu ada standarisasi metodologi SKB syariah yang dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini akan memperkuat ekosistem keuangan syariah yang saat ini sedang berkembang pesat, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam global yang tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga kuat secara kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, S., Elpisah, E., Sabtohadhi, J., Zarkasi, Z., & Fachrurazi, F. (2022). Studi Kelayakan Bisnis. Bandung: Pena Persada

Agustin, H. (2017). Studi Kelayakan Bisnis Syariah (Edisi 1). Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Ahmadi, A. K., Fakhira, D., Sahfira, N. I., Siahaan, R. N., Syahputri, N., & Sihotang, M. K. (2025). Analisis Aspek Pasar sebagai Pilar Utama dalam Studi Kelayakan Bisnis untuk Mendukung Keberlanjutan Usaha. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 3(1), 209-221. <https://doi.org/10.59024/jumek.v3i1.530>

Antonio, M. S. (2020). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Edisi Revisi). Jakarta: Gema Insani Press.

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2022. Jakarta: BPS

Hasan, S., Elpisah, E., Sabtohadhi, J., Zarkasi, Z., & Fachrurazi, F. (2022). Studi Kelayakan Bisnis. Bandung: Penerbit Widina.

Ibrahim, J. (2021). Studi Kelayakan Bisnis. Malang: UMM Press.

Jannah, M., Nirmala, P., & Meirisa, R. (2023). Etika Bisnis Islam: Dapat Direalisasikan atau Hanya Sebatas Teori? *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 2(3). <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.2022>

Karim, A. A. (2021). Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani.

Majid, M. S. A. (2022). Maqasid Syariah sebagai Basis Evaluasi Kelayakan Usaha pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 112-130.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023. Jakarta: OJK.

Rivaldo, R., Wulandari, W., Sapirah, S., & Afrina, C. (2025). Peran Studi Kelayakan dalam Mendukung Keberlanjutan Bisnis Syariah. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>

Saputra, R. A., & Rohman, A. (2024). Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pengembangan UMKM "Dodolanku Surabaya": Analisis Aspek Pemasaran. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 53-59. <https://doi.org/10.30787/jiemi.v2i2.1476>

Setiawan, J., Faturrahman, R., & Sarpini, S. (2025). Penerapan Etika Bisnis di Industri Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(1), 187-196.

Subagyo, A. (2019). *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Widayanti, I., Hasbi, M. Z. N., Ratnawati, S., Giovanni, A., & Atmaja, H. E. (2025). Management of Financial Institutions: Efforts to Improve Sustainable Development and the National Economy. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(3), 2505-2514. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v13i3.8044>